

ETIKA POLITIK DALAM PANCASILA

A. Pengantar

Indonesia adalah negara yang terdiri dari banyak suku, bangsa, ras, agama. Dan Pancasila dapat menjadikan Indonesia sebagai satu kesatuan tanpa perbedaan. Inilah keunikan Pancasila sebagai jati diri di tengah kemajemukan bangsa.

Pada bab sebelumnya kita membahas Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu nilai luhur merupakan sumber dari segala penjabaran norma baik norma moral, norma hukum maupun norma kenegaraan lainnya. Adapun nilai-nilai tersebut akan dijabarkan secara jelas sehingga dapat dijadikan sebagai suatu pedoman.

Pahami dulu soal etika, pengertian etika, sebagai suatu usaha ilmiah, filsafat dibagi menjadi beberapa cabang menurut lingkungan bahasannya masing-masing. Cabang-cabang itu dibagi menjadi dua kelompok bahasan pokok yaitu **satu** filsafat teoritis dan **dua** filsafat praktis. Kelompok pertama mempertanyakan segala sesuatu yang ada, sedangkan kelompok kedua membahas bagaimana manusia bersikap terhadap apa yang ada tersebut. Jadi filsafat teoritis mempertanyakan dan berusaha mencari jawabannya tentang segala sesuatu, misalnya hakikat manusia, alam, hakikat realitas sebagai suatu keseluruhan, tentang pengetahuan, tentang apa yang kita ketahui, tentang yang transenden dan lain sebagainya. Dalam hal ini filsafat teoritis pun juga mempunyai maksud-maksud dan berkaitan erat dengan hal-hal yang bersifat praktis, karena pemahaman yang dicari menggerakkan kehidupannya.

Etika termasuk kelompok filsafat praktis dan dibagi menjadi dua kelompok yaitu etika umum dan etika khusus, Etika merupakan suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral.

Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan pelbagai ajaran moral (Suseno, 1987). Etika umum mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia, sedangkan etika khusus membahas

prinsip-prinsip dalam hubungannya dengan pelbagai aspek kehidupan manusia (Suseno, 1987).

Etika khusus dibagi menjadi etika individual yang membahas kewajiban manusia terhadap diri sendiri dan etika sosial yang membahas tentang kewajiban manusia terhadap manusia lain dalam hidup masyarakat, yang merupakan suatu bagian terbesar dari etika khusus.

Etika berkaitan dengan pelbagai masalah nilai karena etika pada pokoknya membicarakan masalah-masalah yang berkaitan dengan predikat nilai "susila" dan "tidak susila", "baik" dan "buruk".

Kemudian Pengertian Nilai, Norma dan Moral. Nilai atau value termasuk bidang kajian filsafat, yaitu Filsafat Nilai (Axiology Theory of Value). Jadi nilai itu pada hakikatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek, bukan objek itu sendiri. Sesuatu itu mengandung nilai artinya ada sifat atau kualitas yang melekat pada sesuatu itu. Misalnya, bunga itu indah, perbuatan itu susila. Indah dan susila adalah sifat atau kualitas yang melekat pada bunga dan perbuatan. Dengan demikian maka nilai itu sebenarnya adalah suatu kenyataan yang "tersembunyi" di balik kenyataan-kenyataan lainnya.

Ada juga Hirarki nilai, dikemukakan oleh Max Scheler, bahwa nilai-nilai yang ada, tidak sama luhurnya dan tingginya. Nilai-nilai itu secara senyatanya ada yang lebih tinggi dan ada yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai-nilai lainnya. Menurut tinggi rendahnya, nilai-nilai dapat dikelompokkan dalam empat tingkatan sebagai berikut:

- 1) Nilai-nilai kenikmatan: dalam tingkatan ini terdapat deretan nilai-nilai yang menyenangkan dan tidak menyenangkan (die Wertreihe des Angenehmen und Unangenehmen), yang menyebabkan orang senang atau menderita tidak enak.
- 2) Nilai-nilai kehidupan: dalam tingkat ini terdapatlah nilai-nilai yang penting bagi kehidupan (Werte des vitalen Fühlens) misalnya kesehatan, kesegaran jasmani, kesejahteraan umum.
- 3) Nilai-nilai kejiwaan: dalam tingkat ini terdapat nilai-nilai kejiwaan (geistige Werte) yang sama sekali tidak tergantung dari keadaan jasmani dan

lingkungan. Nilai-nilai semacam ini ialah keindahan, kebenaran, dan pengetahuan murni yang dicapai dalam filsafat.

- 4) Nilai-nilai kerohanian: dalam tingkat ini terdapatlah modalitas nilai dari yang suci dan tak suci (wermodalitat des Heiligen und Unheiligen). Nilai-nilai semacam ini terutama terdiri dari nilai-nilai pribadi.

Ada juga menurut Notonagoro membagi nilai menjadi tiga macam, yaitu:

- 1) Nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan manusia, atau kebutuhan material manusia.
- 2) Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia, untuk mengadakan kegiatan atau aktivitas.
- 3) Nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Nilai kerohanian ini dapat dibedakan atas empat macam:
 - a) Nilai kebenaran, yang bersumber pada akal (ratio, budi, cipta) manusia.
 - b) Nilai keindahan atau nilai estetis, yang bersumber pada unsur perasaan (esthetis, goevel, rasa) manusia.
 - c) Nilai kebaikan atau nilai moral, yang bersumber pada unsur kehendak (will, Wollen, karsa) manusia.
 - d) Nilai religius, yang merupakan nilai kerohanian tertinggi dan mutlak. Nilai religius ini bersumber kepada kepercayaan atau keyakinan manusia.

Politik itu sendiri adalah kegiatan untuk menentukan dan melaksanakan tujuan negara. Ibarat kita berlayar, politik itu berupa juru mudi, sedangkan Pancasila berupa kapalnya dan segala perangkat di dalamnya, seperti navigasi, mesin, kemudi dan sebagainya. Nahkoda/jurumudi tak akan banyak berbuat, jika salah satu yang ada di dalam kapal itu mengalami gangguan.

Banyak yang berpikiran bahwa politik tidak hanya berada pada penguasa negara namun rakyat juga sering melakukan tindakan politik, seperti politik dagang, sosial, dan lainnya. Terkadang politik dapat membuat seseorang lupa akan jati dirinya karena sudah memiliki jabatan dan harta yang melimpah. Ada yang dapat mempengaruhi kinerja politik yaitu moral. Ketika

seorang politik (politikus) memiliki moral yang baik maka ia akan bekerja sesuai tugas yang di embannya.

Etika politik adalah cabang dari filsafat politik yang membicarakan perilaku atau perbuatan-perbuatan politik untuk dinilai dari segi baik dan buruknya. Filsafat politik adalah seperangkat keyakinan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dibela dan di perjuangkan oleh para penganutnya, seperti komunisme, fascisme, demokrasi. Filsafat tersebut erat dengan nama-nama pendahulu-pendahulunya seperti komunisme oleh Karl marx/fascisme oleh Mussolini dan demokrasi oleh Thomas Jefferson.

B. Pancasila Sebagai Etika Politik

Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu nilai sehingga merupakan sumber dari segala penjabaran norma baik norma hukum, norma moral maupun norma kenegaraan lainnya. Terkandung didalamnya suatu pemikiran–pemikiran yang bersifat kritis, mendasar, rasional dan komprehensif (menyeluruh) dan sistem pemikiran ini merupakan suatu nilai.

Sebagai suatu nilai, Pancasila memberikan dasar–dasar yang bersifat fundamental dan universal bagi manusia baik dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nilai–nilai tersebut kemudian di jabarkan dalam suatu norma–norma yang jelas sehingga mereupakan suatu pedoman.

Norma–norma tersebut meliputi :

- a) Norma moral yaitu yang berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dapat diukur dari sudut baik maupun buruk.
- b) Norma hukum yaitu suatu sistem peraturan perundang- undangan yang berlaku di indonesia. Dalam pengertian inilah maka pancasila berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum di negara Indonesia.

C. Pengertian etika politik

Etika Politik merupakan cabang etika dan termasuk ke dalam lingkungan filsafat serta mempertanyakan praksis manusia. Etika berkaitan dengan norma moral. Norma Moral yaitu yang berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dapat diukur dari sudut pandang, baik atau buruk, sopan atau tidak sopan, dan susila atau tidak susila sebagai seorang manusia.

Etika tidak lain adalah aturan perilaku, adat kebiasaan dan menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk. Kata etika berasal dari bahasa Yunani *ethos* yang berarti norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah dan ukuran-ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik serta yang dirumuskan oleh beberapa ahli berikut ini:

Etika adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu, atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan pelbagai ajaran moral. Etika merupakan suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Etika termasuk kelompok filsafat praktis dan dibagi menjadi dua kelompok (etika umum dan etika khusus).

Setiap kali kita menyusun strategi atau siasat untuk mendapatkan sesuatu, itulah yang dinamakan berpolitik. Secara etimologis istilah politik sendiri pertama kali muncul di Yunani, yaitu dari kata “polis”, yang artinya “kota”.

Sedangkan dari segi pemerintahan, kata Politik berarti cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah) yang berkaitan dengan segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain (KBBI).

Pengertian politik berasal dari kosakata ‘politics’ yang memiliki makna bermacam-macam yaitu kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses penentuan tujuan-tujuan dari sistem itu dan diikuti dengan pelaksanaan tujuan itu. Pokok politik yang berkaitan dengan negara (state), kekuatan (power), pengambilan keputusan (decision making), kebijaksanaan (policy), pembagian (distribution), secara alokasi (allocation).

Pengertian politik secara sempit, yaitu bidang politik yang lebih banyak berkaitan dengan para pelaksana pemerintahan negara, lembaga-lembaga tinggi negara, kalangan aktivis politik serta para birokrat dan para pejabat dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara.

Pengertian politik lebih luas, yaitu menyangkut seluruh unsur yang menyangkut suatu persekutuan hidup yang disebut masyarakat negara. Jadi etika politik ialah etika yang berkait erat dengan bidang pembahasan moral yang tidak dapat dipisahkan dengan pelaku etika yaitu manusia.

Walaupun dalam hubungannya dengan masyarakat bangsa maupun negara, etika politik Tetap menetapkan dasar fundamental manusia sebagai manusia. Dasar ini menegaskan agar etika politik senantiasa didasarkan pada hakikat manusia sebagai manusia yang beradab dan berbudaya.

Dengan kata lain, ***etika politik mempersoalkan kebaikan dan tanggung jawab manusia sebagai manusia serta manusia sebagai warga negara terhadap negara, hukum yang berlaku serta tatanan publik lainnya***. Kebaikan manusia sebagai manusia tidak selalu identik dengan kebaikan manusia sebagai warga negara. Keidentikan antara manusia yang baik dengan warga negara yang baik bisa berlangsung dalam suatu negara yang baik (Aristoteles). Negara yang baik membawa kebaikan manusia sebagai manusia serta manusia sebagai warga negara.

Untuk menciptakan negara yang baik, penyelenggara negara dan warga negara perlu memahami dan menjalankan etika politik sesuai dengan nilai-nilai dasar yang disepakati sebagai titik temu dan panduan bangsa yang bersangkutan.

D. Ciri-ciri sistem politik pancasila

Pancasila sebagai sistem politik memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Bersifat kekeluargaan dan gotong royong yang bernafas Ketuhanan YME.
- b. Menghargai hak-hak asasi manusia serta menjamin hak-hak minoritas.
- c. Pengambilan keputusan sedapat mungkin didasarkan atas musyawarah untuk hasil yang mufakat Bersendi atas hukum.

Ciri-ciri sistem politik liberalisme, diantaranya:

- a. Sangat menekankan kebebasan/kemerdekaan individu.
- b. Sangat menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia yang utama seperti hak hidup, hak kemerdekaan, hak mengejar kebahagiaan, dan sebagainya.
- c. Melahirkan sekularisme (memisahkan antara negara dengan agama)
- d. Adanya budaya yang tinggi Paradigma Sistem Politik Pancasila Sebagai Sistem Politik Indonesia.

Di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea terakhir atau keempat telah jelas disebutkan bahwa sistem politik Indonesia berlandaskan pada lima bunyi Pancasila. Oleh karena itu sistem politik Indonesia sering disebut dengan sistem politik Pancasila. Sistem tersebut berdasarkan pada semua peraturan yang ada di dalam Undang Undang Dasar 1945.

Semua kedudukan, tugas, hubungan antar Institusi didalam suatu Negara secara rinci diatur didalam UUD 1945. Disitu tertera pula tentang segala bentuk kewajiban sekaligus hak negara yang harus dijalankan. UUD 1945 telah mengalami Banyak perubahan atau dikenal dengan amandemen, oleh karena itu sistem politik yang ada di Indonesia pada masa itu juga mengalami perubahan.

E. Fungsi dan tugas etika politik

Tugas etika politik adalah membantu agar pembahasan masalah-masalah ideologis dapat dijalankan secara objektif dan sebagai pegangan normatif bagi mereka yang ingin menilai kualitas tatanan kehidupan politik dengan tolak ukur martabat manusia dan legitimasi moral.

Etika politik dapat membantu usaha aparatur negara untuk membumikan falsafah dan ideologi negara yang luhur ke dalam realitas politik yang nyata. Etika politik memberikan landasan normatif bagaimana sebuah negara dikelola demi kebaikan hidup bersama seluruh masyarakat. Dalam menjalankan kehidupan politik dan kenegaraan berbasis etika, para pekerja

politik dan penyelenggara negara perlu memahami landasan-landasan normatif yang bersifat umum dan khusus.

Pokok pembahasan etika politik adalah hukum dan kekuasaan negara. Hukum sebagai lembaga penata masyarakat yang normatif dan kekuasaan sebagai lembaga penata masyarakat yang berkuasa. Hukum tanpa kekuasaan negara tidak dapat berbuat apa-apa, sifatnya normatif belaka artinya hukum tidak mempunyai kemampuan untuk bertindak. Sedangkan kekuasaan negara tanpa hukum adalah buta, kekuasaan negara yang memakai kekuasaannya tanpa hukum merupakan negara penindas.

Pokok permasalahan etika politik adalah ***legitimasi kekuasaan*** yang dirumuskan dengan pertanyaan dengan moral apa seseorang atau sekelompok orang memegang dan menggunakan kekuasaan yang mereka miliki? Betapapun besarnya kekuasaan seseorang, dia harus berhadapan dengan tuntutan untuk mempertanggungjawabkannya. Secara etika politik, seorang penguasa yang sesungguhnya adalah keluhuran budinya.

Legitimasi kekuasaan meliputi :

1. Legitimasi etis yaitu pembenaran wewenang negara (kekuasaan negara berdasarkan prinsip-prinsip moral) legitimasi etis kekuasaan mempersoalkan keabsahan kekuasaan politik dari segi norma- norma moral dengan tujuan agar kekuasaan itu mengarahkan kekuasaan ke pemakaian kebijakan dan cara-cara yang sesuai dengan tuntutan kemanusiaan yang adil dan beradab.
2. Legitimasi legalitas yaitu keabsahan kekuasaan yang berkaitan dengan fungsi-fungsi kekuasaan negara dan menuntut fungsi-fungsi kekuasaan negara itu dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku

F. Prinsip Sistem Politik Pancasila

Sebagai etika politik, Pancasila mempunyai prinsip :

1. Pluralisme

Pluralisme adalah kesediaan untuk menerima pluralitas.

2. Hak Asasi Manusia

Jaminan hak-hak asasi manusia adalah bukti Kemanusiaan yang adil dan beradab. Mutlak karena merupakan anugrah dari Sang Pencipta.

3. Solidaritas Bangsa

Solidaritas bermakna manusia tidak hanya hidup demi diri sendiri, melainkan juga demi orang lain.

4. Partisipasi demokratis masyarakat

Prinsip “kedaulatan rakyat” menyatakan bahwa tak ada yang berhak untuk menentukan dan memaksakan orang lain.

5. Adanya cita-cita the rule of law

6. Struktur sosial budaya masyarakat

7. Keadilan sosial